

ABSTRAK

Tingginya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba, terutama dalam bentuk pengulangan perbuatan pidana (residivisme), menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Permasalahan ini menjadi krusial karena harus mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan secara berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengulangi tindak pidana narkoba sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PT Bdg serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan sebagai sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang komprehensif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak residivis dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan represif dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara kebijakan penegakan hukum dan perlindungan anak melalui pendekatan yang lebih holistik, serta penguatan peran diversifikasi dan rehabilitasi dalam kasus residivisme anak pelaku tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Residivisme, Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

The increasing involvement of minors in narcotics-related offenses, particularly in cases of recidivism, has raised significant concerns regarding the effectiveness of Indonesia's juvenile criminal justice system. This issue is critical, as it necessitates a delicate balance between ensuring legal certainty and upholding the principle of child protection. This study aims to examine the criminal liability of children involved in repeated narcotics offenses, as reflected in Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk and Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2024/PT Bdg, and to assess their conformity with applicable legal provisions in Indonesia. The research adopts a normative juridical approach, relying on statutory regulations, legal literature, and judicial decisions as secondary legal materials. Data were obtained through a comprehensive literature review to construct a solid theoretical and legal foundation. The findings indicate that the imposition of criminal liability on recidivist juvenile offenders in these decisions does not fully align with the restorative justice principles mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, the sentencing practices reveal a persistent tension between punitive measures and the protection of children's rights. The study concludes that a more holistic and harmonized approach is required—integrating law enforcement policies with child protection strategies, and strengthening the implementation of diversion and rehabilitation for juvenile narcotics recidivists.

Keywords: *Juvenile Criminal Liability, Recidivism, Narcotics Offense*